

MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS POTENSI WILAYAH DAN KEARIFAN LOKAL DALAM PROGRAM KAMPUNG IKLIM DI KABUPATEN TANAH LAUT

Nova Lina¹, Muhammad Riduansyah Syafari², Taufik Arbain³, Nurul Azkar⁴

¹novafauzi84@gmail.com, ²riduansyah.publik-fisip@ulm.ac.id, ³taufik.arbain@ulm.ac.id,
⁴nurul.azkar@ulm.ac.id

Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2026

Revised Juni 2026

Accepted Juni 2026

Available Juni 2026

novafauzi84@gmail.com,

riduansyah.publik-fisip@ulm.ac.id,

taufik.arbain@ulm.ac.id,

nurul.azkar@ulm.ac.id

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute*

ABSTRAK

Perubahan iklim merupakan tantangan global yang berdampak pada aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat sehingga diperlukan upaya adaptasi dan mitigasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat berbasis potensi wilayah dan kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan potensi wilayah dan kearifan lokal yang mendukung Program Kampung Iklim (ProKlim), menganalisis proses dan hasil pemberdayaan masyarakat, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya, serta merancang model pemberdayaan masyarakat yang mendukung keberlanjutan ProKlim. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus multipel pada tiga desa ProKlim di Kabupaten Tanah Laut, yaitu Desa Tirta Jaya, Desa Sungai Rasau, dan Desa Martadah Baru. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap 15 informan yang dipilih secara purposive, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi wilayah dan kearifan lokal menjadi modal utama dalam pengembangan ProKlim melalui pemanfaatan TOGA, mangrove, hasil pertanian dan perikanan, batik sasirangan, UMKM, serta budaya gotong royong dan musyawarah desa. Proses pemberdayaan berlangsung melalui tahapan penyadaran, penguatan kapasitas, participating masyarakat, penguatan kelembagaan, dan kemandirian ekonomi. Program ini memberikan dampak positif terhadap aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan, meskipun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pendanaan, kapasitas sumber daya manusia, dan akses pemasaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model pemberdayaan masyarakat berbasis potensi wilayah dan kearifan lokal yang mengintegrasikan dimensi ekologi, ekonomi, sosial-budaya, digitalisasi, dan kelembagaan kolaboratif dapat memperkuat keberlanjutan Program Kampung Iklim di Kabupaten Tanah Laut.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Potensi Wilayah, Kearifan Lokal, Program Kampung Iklim (ProKlim), Keberlanjutan.

ABSTRACT

Climate change is a global challenge that affects environmental, social, and economic aspects of society, requiring adaptation and mitigation efforts that actively involve community participation based on regional potential and local wisdom. This study aims to describe the regional potential and local wisdom that support the implementation of the Climate Village Program (ProKlim), analyze the processes and outcomes of community empowerment, identify

*Corresponding author

E-mail addresses: novafauzi84@gmail.com

the supporting and inhibiting factors affecting its implementation, and develop an integrated community empowerment model to enhance the sustainability of ProKlim. The study employed a qualitative approach using a multiple case study method in three ProKlim villages in Tanah Laut Regency, namely Tirta Jaya Village, Sungai Rasau Village, and Martadah Baru Village. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis involving 15 purposively selected informants and were analyzed using an interactive analysis model. The findings reveal that regional potential and local wisdom constitute the primary assets for the development of ProKlim through the utilization of family medicinal plants (TOGA), mangrove resources, agricultural and fisheries products, sasirangan batik, micro, small, and medium enterprises, as well as the traditions of cooperation and village deliberation. The community empowerment process consists of five stages: awareness building, capacity strengthening, community participation, institutional strengthening, and economic self-reliance. The program has generated positive impacts on environmental, social, economic, and institutional aspects, although it continues to face challenges related to limited funding, human resource capacity, and market access. This study concludes that a community empowerment model based on regional potential and local wisdom, integrating ecological, economic, socio-cultural, digitalization, and collaborative institutional dimensions, can strengthen the sustainability of the Climate Village Program in Tanah Laut Regency.

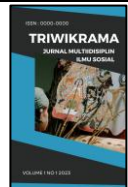
Keywords: Community Empowerment, Regional Potential, Local Wisdom, Climate Village Program (ProKlim), Sustainability.

1. PENDAHULUAN

Perubahan iklim merupakan tantangan global yang berdampak pada aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Untuk menghadapi kondisi tersebut, diperlukan upaya adaptasi dan mitigasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui pemanfaatan potensi wilayah dan kearifan lokal. Di Indonesia, upaya tersebut diwujudkan melalui Program Kampung Iklim (ProKlim) yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Program ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Di Kabupaten Tanah Laut, ProKlim telah berkembang di beberapa desa, seperti Desa Tirta Jaya, Desa Sungai Rasau, dan Desa Martadah Baru, melalui berbagai kegiatan berbasis potensi lokal, antara lain eduwisata TOGA, sirup mangrove, batik sasirangan, bank sampah, budidaya maggot, dan UMKM berbasis lingkungan. Namun, berbagai kegiatan tersebut masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi dalam suatu model pemberdayaan masyarakat yang komprehensif dan berkelanjutan.

Secara teoritis, pemberdayaan masyarakat dipandang sebagai proses peningkatan kapasitas individu dan kelompok untuk mengelola sumber daya serta menentukan arah pembangunan secara mandiri (Rappaport, 1987; Zimmerman, 1995). Pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) menekankan pemanfaatan aset dan potensi lokal sebagai dasar pembangunan (Kretzmann & McKnight, 1993), sedangkan Community-Based Participatory Research (CBPR) menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam setiap tahapan kegiatan (Israel et al., 1998). Selain itu, konsep Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2007) dan Co-Production (Ostrom, 1996) menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta dalam menciptakan tata kelola yang efektif dan berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau, dan kearifan lokal yang mengintegrasikan aspek ekologi, ekonomi, sosial-budaya, dan kelembagaan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas efektif dalam memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim (Reid et al., 2016), sementara kearifan lokal dan pengetahuan ekologis tradisional berkontribusi terhadap keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam (Berkes, 2018; Pretty et al., 2020). Studi tentang ABCD juga membuktikan bahwa pemanfaatan aset lokal mampu meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat (Mathie & Cunningham, 2003; South, 2024). Di Indonesia, penelitian Rahmawati dan Nugroho (2022), Setiawan et al. (2021), dan Amalia (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi dapat memperkuat



daya saing UMKM desa. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada satu dimensi tertentu dan belum mengintegrasikan aspek lingkungan, ekonomi, sosial-budaya, digitalisasi, dan kelembagaan dalam kerangka ProKlim.

Berdasarkan telaah tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) berupa belum tersedianya model pemberdayaan masyarakat ProKlim yang mengintegrasikan potensi wilayah, kearifan lokal, ekonomi hijau, digitalisasi, dan tata kelola kolaboratif secara utuh, khususnya pada konteks desa-desa ProKlim di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pengembangan model pemberdayaan masyarakat berbasis potensi wilayah dan kearifan lokal yang menggabungkan lima dimensi utama, yaitu ekologi, ekonomi, sosial-budaya, digitalisasi, dan kelembagaan kolaboratif dalam mendukung keberlanjutan Program Kampung Iklim.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan potensi wilayah dan kearifan lokal yang mendukung ProKlim, menganalisis proses dan hasil pemberdayaan masyarakat, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya, serta merancang model pemberdayaan masyarakat yang integratif untuk memperkuat keberlanjutan Program Kampung Iklim di Kabupaten Tanah Laut.

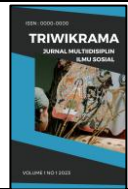
2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus multipel (*multiple case study*). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara mendalam proses, makna, dan dinamika pemberdayaan masyarakat dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) yang berbasis potensi wilayah dan kearifan lokal. Metode studi kasus multipel memungkinkan perbandingan antar lokasi penelitian sehingga dapat menghasilkan model pemberdayaan yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Penelitian dilaksanakan pada tahun 2026 di tiga desa pelaksana Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin, Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur, dan Desa Martadah Baru Kecamatan Tambang Ulang. Ketiga desa dipilih secara purposive karena memiliki karakteristik potensi wilayah dan bentuk kearifan lokal yang berbeda serta telah mengembangkan berbagai kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Subjek penelitian terdiri atas 15 informan kunci yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, meliputi kepala desa, pengelola ProKlim, pengurus BUMDes, pelaku UMKM, dan tokoh masyarakat yang memahami implementasi ProKlim di masing-masing desa.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan diskusi dengan informan mengenai proses pemberdayaan, pemanfaatan potensi wilayah, penerapan kearifan lokal, serta faktor pendukung dan penghambat ProKlim. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, seperti laporan ProKlim, RPJMDes, profil desa, kebijakan pemerintah, serta berbagai literatur dan hasil penelitian yang relevan. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang didukung dengan pedoman wawancara, lembar observasi, alat perekam suara, kamera digital, dan perangkat komputer untuk pengolahan data.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tiga tahapan, yaitu: (1) kondensasi data, melalui proses seleksi, penyederhanaan, dan pengodean data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi; (2) penyajian data, dalam bentuk narasi, matriks, dan kategorisasi tematik untuk memudahkan interpretasi; serta (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian hingga diperoleh temuan yang konsisten. Untuk menjamin keabsahan



data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, serta member check kepada informan guna mengonfirmasi hasil interpretasi peneliti. Hasil analisis selanjutnya disintesis dengan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) dan *Community-Based Participatory Research* (CBPR) untuk merumuskan model pemberdayaan masyarakat berbasis potensi wilayah dan kearifan lokal yang mendukung keberlanjutan Program Kampung Iklim di Kabupaten Tanah Laut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kabupaten Tanah Laut berkembang melalui pemanfaatan potensi wilayah dan kearifan lokal sebagai modal utama pemberdayaan masyarakat. Penelitian yang dilakukan di Desa Tirta Jaya, Desa Sungai Rasau, dan Desa Martadah Baru memperlihatkan bahwa setiap desa memiliki karakteristik sumber daya dan praktik sosial budaya yang berbeda, namun seluruhnya memiliki kontribusi penting terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Potensi tersebut meliputi pengembangan Tanaman Obat Keluarga (TOGA), budidaya maggot, pengelolaan bank sampah, pemanfaatan mangrove, pengolahan hasil perikanan dan pertanian, pengembangan batik sasirangan, serta berbagai kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis lingkungan. Di sisi lain, nilai-nilai gotong royong, musyawarah desa, kegiatan keagamaan, selamatan kampung, dan tradisi lokal lainnya menjadi bentuk kearifan lokal yang memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan ProKlim.

Temuan ini menunjukkan bahwa potensi wilayah dan kearifan lokal bukan hanya menjadi pelengkap kegiatan ProKlim, melainkan fondasi utama dalam membangun partisipasi dan keberlanjutan program. Potensi sumber daya alam dan budaya lokal mampu diolah menjadi kegiatan produktif yang memberikan manfaat ekologis sekaligus ekonomi. Kondisi ini sejalan dengan konsep *Asset-Based Community Development* (ABCD) yang dikembangkan oleh Kretzmann dan McKnight (1993), yang menekankan bahwa pembangunan masyarakat sebaiknya berangkat dari aset dan kekuatan yang dimiliki komunitas, bukan dari kelemahan atau permasalahan yang dihadapi. Dalam konteks penelitian ini, TOGA, mangrove, hasil pertanian, batik sasirangan, dan tradisi gotong royong merupakan aset komunitas yang berhasil dimobilisasi menjadi sumber ketahanan sosial-ekologis masyarakat desa.

Proses pemberdayaan masyarakat dalam Program Kampung Iklim berlangsung melalui lima tahapan utama, yaitu penyadaran, penguatan kapasitas, pelibatan dan partisipasi masyarakat, penguatan kelembagaan, serta kemandirian ekonomi. Tahap penyadaran dilakukan melalui sosialisasi, edukasi lingkungan, penyuluhan perubahan iklim, dan kampanye kebersihan lingkungan yang bertujuan membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan. Tahap ini menjadi fondasi awal karena perubahan perilaku masyarakat tidak akan terjadi tanpa adanya pemahaman dan kesadaran kolektif mengenai ancaman perubahan iklim dan pentingnya pengelolaan lingkungan berbasis komunitas.

Tahap berikutnya adalah penguatan kapasitas melalui berbagai pelatihan, seperti pengelolaan sampah, budidaya maggot, pengolahan hasil pertanian dan perikanan, pengembangan UMKM, pengolahan produk TOGA, hingga pemasaran produk berbasis digital. Penguatan kapasitas tersebut memperlihatkan bahwa pemberdayaan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian bantuan, tetapi sebagai proses peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat agar mampu mengelola potensi lokal secara mandiri. Selanjutnya, tahap pelibatan dan partisipasi masyarakat diwujudkan melalui keterlibatan aktif warga dalam musyawarah desa, kegiatan penghijauan, pengelolaan bank sampah, konservasi mangrove, pengembangan UMKM, dan berbagai kegiatan lingkungan lainnya. Tahap penguatan kelembagaan dilakukan melalui sinergi



antara pemerintah desa, kelompok ProKlim, BUMDes, kelompok tani, PKK, kelompok UMKM, dan lembaga adat. Kolaborasi tersebut menjadi dasar bagi tumbuhnya kemandirian ekonomi masyarakat melalui aktivitas produktif berbasis lingkungan seperti produksi sirup mangrove, pengolahan hasil laut, produk herbal TOGA, budidaya maggot, batik sasirangan, dan produk pangan lokal.

Rangkaian proses tersebut memperlihatkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam ProKlim merupakan proses yang bersifat bertahap dan berkelanjutan. Temuan ini memperkuat teori pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Rappaport (1987), Zimmerman (1995), serta Ife dan Tesoriero (2014), yang menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan proses peningkatan kapasitas individu dan kelompok untuk memperoleh kendali terhadap keputusan dan tindakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Pemberdayaan tidak hanya menghasilkan peningkatan kemampuan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kapasitas sosial, penguatan kelembagaan, dan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal secara berkelanjutan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Program Kampung Iklim telah memberikan dampak positif terhadap aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Pada aspek lingkungan, masyarakat menjadi lebih sadar terhadap pentingnya menjaga kelestarian alam melalui kegiatan penghijauan, pengelolaan sampah, pengembangan bank sampah, pemanfaatan TOGA, konservasi mangrove, serta budidaya maggot sebagai alternatif pengolahan sampah organik. Berbagai aktivitas tersebut mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju pola hidup yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Reid et al. (2016) yang menyatakan bahwa pendekatan community-based adaptation mampu meningkatkan ketahanan ekologis dan sosial masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim.

Pada aspek sosial, implementasi ProKlim telah memperkuat partisipasi masyarakat dan memperkuat modal sosial desa. Kegiatan gotong royong, musyawarah, kerja bakti lingkungan, dan kolaborasi antar kelompok masyarakat menunjukkan bahwa pelaksanaan ProKlim tidak hanya menghasilkan perubahan fisik, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan solidaritas masyarakat. Nilai-nilai kearifan lokal yang masih dipertahankan terbukti menjadi perekat sosial yang mendukung keberhasilan program. Temuan ini mendukung pandangan Berkes (2018) dan Pretty et al. (2020) yang menegaskan bahwa pengetahuan ekologis tradisional dan kearifan lokal memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan membangun ketahanan komunitas.

Pada aspek ekonomi, Program Kampung Iklim mendorong lahirnya berbagai usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal. Pengolahan sirup mangrove, produk herbal TOGA, batik sasirangan, produk olahan hasil laut, dan olahan pangan lokal tidak hanya meningkatkan nilai tambah sumber daya desa, tetapi juga memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat. Aktivitas ekonomi tersebut menunjukkan bahwa ProKlim telah berkembang menjadi instrumen penguatan ekonomi hijau (*green economy*) yang mengintegrasikan pelestarian lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep UNEP (2011) yang menekankan bahwa ekonomi hijau merupakan aktivitas ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan degradasi ekosistem. Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Rahmawati dan Nugroho (2022), Setiawan et al. (2021), dan Amalia (2024) yang menunjukkan bahwa pengembangan UMKM dan digitalisasi mampu meningkatkan daya saing ekonomi desa.

Pada aspek kelembagaan, penelitian menemukan bahwa keberhasilan ProKlim didukung oleh adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah desa, kelompok masyarakat, BUMDes, kelompok tani, PKK, pelaku UMKM, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Bentuk kolaborasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat tidak dapat



dilakukan oleh satu aktor saja, melainkan membutuhkan kerja sama multipihak. Kondisi tersebut sejalan dengan teori Collaborative Governance yang dikemukakan Ansell dan Gash (2007), yang menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan publik yang kompleks memerlukan dialog, kepercayaan, komitmen, dan tujuan bersama di antara seluruh aktor yang terlibat. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan bank sampah, konservasi lingkungan, dan pengembangan usaha ekonomi lokal juga memperlihatkan praktik Co-Production of Public Services (Ostrom, 1996), di mana masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama memproduksi dan mengelola layanan publik.

Di samping berbagai capaian tersebut, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi ProKlim. Faktor pendukung utama meliputi ketersediaan potensi wilayah, kuatnya kearifan lokal, tingginya partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah desa, dan keberadaan kelembagaan lokal yang aktif. Potensi sumber daya alam dan budaya lokal menjadi modal dasar yang memungkinkan masyarakat mengembangkan berbagai inovasi lingkungan dan ekonomi. Sebaliknya, faktor penghambat yang masih dihadapi antara lain keterbatasan pendanaan, kapasitas sumber daya manusia yang belum merata, terbatasnya akses pemasaran produk, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung pengembangan usaha berbasis lingkungan. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan ProKlim memerlukan dukungan kebijakan yang lebih kuat, terutama dalam aspek penguatan kapasitas, pendampingan, akses pembiayaan, dan digitalisasi ekonomi desa.

Berdasarkan hasil analisis lintas kasus pada tiga desa penelitian, diperoleh suatu sintesis bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam ProKlim dipengaruhi oleh keterhubungan yang erat antara potensi wilayah, kearifan lokal, partisipasi masyarakat, penguatan kelembagaan, pengembangan ekonomi hijau, dan keberlanjutan lingkungan. Hubungan tersebut membentuk suatu alur pemberdayaan yang dimulai dari identifikasi dan pemanfaatan potensi wilayah, diperkuat oleh nilai-nilai kearifan lokal, diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat, didukung oleh kelembagaan kolaboratif, dan menghasilkan kegiatan ekonomi hijau yang pada akhirnya memperkuat keberlanjutan Program Kampung Iklim dan ketahanan iklim desa.

Temuan tersebut menjadi dasar dalam merumuskan Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Wilayah dan Kearifan Lokal dalam Program Kampung Iklim. Model yang dikembangkan dalam penelitian ini mengintegrasikan lima dimensi utama, yaitu dimensi ekologi, ekonomi, sosial-budaya, digitalisasi, dan kelembagaan kolaboratif. Dimensi ekologi diwujudkan melalui kegiatan konservasi dan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat; dimensi ekonomi melalui pengembangan UMKM dan ekonomi hijau; dimensi sosial-budaya melalui pelestarian nilai-nilai gotong royong dan kearifan lokal; dimensi digitalisasi melalui penguatan pemasaran dan promosi produk berbasis teknologi; serta dimensi kelembagaan melalui penguatan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta.

Model ini merupakan pengembangan dari teori *ABCD* dan *Community-Based Participatory Research* (CBPR) dengan memasukkan unsur digitalisasi dan ekonomi hijau sebagai komponen baru yang belum banyak diakomodasi dalam penelitian terdahulu. Jika pendekatan *ABCD* menitikberatkan pada pemanfaatan aset lokal dan CBPR pada partisipasi aktif masyarakat, maka model yang dihasilkan dalam penelitian ini menambahkan dimensi digitalisasi dan tata kelola kolaboratif sebagai instrumen untuk meningkatkan keberlanjutan dan daya saing masyarakat desa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi relevansi teori-teori pemberdayaan yang telah ada, tetapi juga memodifikasinya melalui pengembangan model integratif yang lebih sesuai dengan kebutuhan implementasi Program Kampung Iklim di era pembangunan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kampung Iklim di Kabupaten Tanah Laut telah berhasil mengintegrasikan pelestarian lingkungan, penguatan



ekonomi lokal, pelestarian kearifan lokal, dan penguatan kelembagaan masyarakat dalam satu kerangka pemberdayaan yang saling mendukung. Model pemberdayaan yang dihasilkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian pemberdayaan masyarakat dan administrasi publik, sekaligus menawarkan implikasi praktis sebagai acuan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan pembangunan desa berbasis potensi wilayah dan kearifan lokal untuk mendukung keberlanjutan Program Kampung Iklim.

4. SIMPULAN

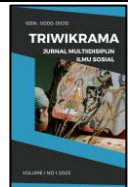
Keberhasilan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kabupaten Tanah Laut didukung oleh pemanfaatan potensi wilayah dan kearifan lokal sebagai dasar pemberdayaan masyarakat. Proses pemberdayaan melalui penyadaran, penguatan kapasitas, partisipasi, penguatan kelembagaan, dan kemandirian ekonomi mampu meningkatkan kualitas lingkungan, memperkuat modal sosial, serta mengembangkan ekonomi hijau berbasis desa. Temuan utama penelitian ini adalah terbentuknya Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Wilayah dan Kearifan Lokal yang mengintegrasikan dimensi ekologi, ekonomi, sosial-budaya, digitalisasi, dan kelembagaan kolaboratif. Model ini menjadi inovasi yang dapat mendukung keberlanjutan ProKlim dan menjadi acuan pengembangan kebijakan pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. (2024). Digital Inclusion and Market Access for Rural MSMEs in Indonesia. *Journal of Sustainable Digital Economy*, 5(2), 45-60.
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.
- Berkes, F. (2018). *Sacred Ecology: Traditional Ecological Knowledge and Resource Management* (4th ed.). Routledge.
- Bovaird, T. (2007). Beyond Engagement and Participation: User and Community Co-Production of Public Services. *Public Administration Review*, 67(5), 846-860. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00773>.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2015). Designing and Implementing Cross-Sector Collaborations: Needed and Challenging. *Public Administration Review*, 75(5), 647-663. <https://doi.org/10.1111/puar.12432>.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative Governance Regimes*. Georgetown University Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1-29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>.
- Green, G. P., & Haines, A. (2016). *Asset Building and Community Development* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Hidayat, M., Wibowo, S., & Lestari, D. (2021). Sustainable Agroindustry Development Based on Local Resources in Rural Areas. *Journal of Rural Development Studies*, 15(2), 45-58.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2014). *Community Development: Community-Based Alternatives in an Age of Globalisation* (2nd ed.). Melbourne: Pearson Education.
- Israel, B. A., Schulz, A. J., Parker, E. A., & Becker, A. B. (1998). Review of Community-Based Research: Assessing Partnership Approaches to Improve Public Health. *Annual Review of Public Health*, 19, 173-202.



- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). Pedoman pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim). Jakarta: KLHK.
- Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). Building Communities from The Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing A Community's Assets. ACTA Publications.
- Lemos, M. C., & Agrawal, A. (2006). Environmental Governance. *Annual Review of Environment and Resources*, 31, 297-325. <https://doi.org/10.1146/annurev.energy.31.042605.135621>.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications.
- Mathie, A., & Cunningham, G. (2003). From Clients to Citizens: Asset - Based Community Development as a Strategy for Community - Driven Development. *Development in Practice*, 13(5), 474-486.
- Meadowcroft, J. (2007). Who is in Charge Here? Governance for Sustainable Development in a Complex World. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 9(3-4), 299-314. <https://doi.org/10.1080/15239080701631544>.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Minkler, M., & Wallerstein, N. (2008). *Community-Based Participatory Research for Health: From Process to Outcomes* (2nd ed.). Jossey-Bass.
- Ostrom, E. (1996). Crossing the Great Divide: Coproduction, Synergy, and Development. *World Development*, 24(6), 1073-1087. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(96\)00023](https://doi.org/10.1016/0305-750X(96)00023).
- Pretty, J., Adams, B., Berkes, F., & Turner, R. (2020). Local Ecological Knowledge and Sustainable Resource Management. *Ecology and Society*, 25(3), 12-25. <https://doi.org/10.5751/ES-11885-250312>.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Rahmawati, A., & Nugroho, D. (2022). Digital Marketing Transformation for Rural MSMEs: Challenges and Strategies. *Indonesian Journal of Entrepreneurship and Innovation*, 3(1), 22-34.
- Rappaport, J. (1987). Terms of empowerment/exemplars of prevention: Toward a theory for community psychology. *American Journal of Community Psychology*, 15(2), 121-148. <https://doi.org/10.1007/BF00919275>.
- Reid, H., Alam, M., Berger, R., Cannon, T., & Milligan, A. (2016). *Community-Based Adaptation to Climate Change: Scaling it up*. Routledge.
- Rhodes, R. A. W. (1996). The New Governance: Governing Without Government. *Political Studies*, 44(4), 652-667. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb01747>.
- Sachs, J. D. (2015). *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press.
- Setiawan, R., Aditama, T., & Kusuma, P. (2021). Digital Empowerment of Agro-Entrepreneurs Through E-Commerce Platforms in Indonesia. *International Journal of Business and Society*, 22(4), 1874-1889.
- South, J. (2024). Asset-based community development: Contemporary Evidence and Practice Implications. *Community Development Journal*, 59(1), 33-52. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsad010>.
- Stover, C. (2024). Community-Based Participatory Research for Empowerment: Lessons from Global Health Contexts. *Public Health Practice*, 5(3), 110-126. <https://doi.org/10.1016/j.puhip.2024.110126>.
- Suharto, E. (2017). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial* (Edisi revisi). Refika Aditama.
- UNEP. (2011). *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. United Nations Environment Programme.



- United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. United Nations.
- Wallerstein, N., & Duran, B. (2010). Community-Based Participatory Research Contributions to Intervention Research: The Intersection of Science and Practice to Improve Health Equity. *American Journal of Public Health*, 100(S1), S40-S46. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2009.184036>.
- WCED. (1987). *Our Common Future*. World Commission on Environment and Development. Oxford University Press.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Sage Publications.
- Zhang, X. (2024). Participatory Action and Empowerment Through CBPR: A Review of Recent Evidence. *Frontiers in Public Health*, 12, 143-162. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.00143>.
- Zimmerman, M. A. (1995). Psychological empowerment: Issues and illustrations. *American Journal of Community Psychology*, 23(5), 581-599. <https://doi.org/10.1007/BF02506983>.